

ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM

Jonner Pangaribuan¹, Haneessa Hana Situmorang²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Santo Thomas Medan
Jl. Setia Budi No.479F, Tj. Sari, Kota Medan 20133 Email
:haneessahanasitumorang@gmail.com, jonnerpangaribuan62@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Batam. Instrument dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarakan langsung kepada responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* dengan criteria sampel yaitu Camat, Sekretaris Camat, Kasubbag Keuangan dan Program serta *Staff* yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 tahun.. Instrument dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarakan langsung kepada responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Batam. Begitu pula dengan transparansi pengelolaan keuangan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan maka kinerja pemerintah daerah juga akan semakin baik. Dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan seluruh unit yang ada diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka mendorong terciptanya pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Kinerja, Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Salah satu wujud reformasi adalah pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah kabupaten maupun kota sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, tentang Pemerintah Daerah yang meletakkan otonomi penuh, luas, dan bertanggungjawab pada daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Indikator keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak hanya diukur oleh Pemerintah Daerah saja melainkan juga masyarakat. Kinerja pemerintah banyak menjadi sorotan karena semakin rendahnya tingkat kepedulian pemerintah terhadap upaya perbaikan kinerja yang lebih efisien. Hal tersebut dilihat dari masih banyaknya kinerja instansi pemerintah yang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Menurut Menurut Hendra (2017:10) pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi kepada kepentingan public (*public oriented*). Di Indonesia pengukuran kinerja dilakukan untuk menanggapi TAP MPR No. IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menanggapi hal tersebut maka dikeluarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah menyusun perencanaan strategis, melakukan pengukuran kinerja dan melaporkannya sebagai

wujud akuntabilitas. Kinerja Pemerintah dikatakan baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan dengan baik sehingga mensejahterakan masyarakatnya. Pengukuran kinerja pemerintah berkaitan erat dengan pertanggungjawaban kepada publik. Pertanggungjawaban publik sebagaimana yang dimaksud adalah akuntabilitas dan transparansi. Aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas artinya pertanggungjawaban pemerintah melaporkan segala aktivitasnya kepada publik. Pemerintah diwajibkan menyajikan, melaporkan, serta mempertanggungjawabkan segala aktivitas maupun kegiatan terutama di bidang pengelolaan keuangan daerah kepada publik. Sedangkan Transparansi artinya keterbukaan pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya daerah kepada masyarakat. Transparansi dapat membantu mengurangi adanya peluang kecurangan seperti korupsi dan hal-hal lainnya. Tuntutan akan kinerja maupun tata kelola pemerintahan yang baik terjadi hampir di semua instansi pemerintahan sejalan dengan konsep otonomi daerah dan penetapan peraturan perundang-undangan termasuk juga pada Pemerintah Kota Batam. Fenomena yang terjadi terkait kinerja instansi di Pemerintah Kota Batam tahun 2016 yaitu mengenai kasus dugaan korupsi perjalanan dinas anggota DPRD Kota Batam bulan Januari-Mei 2016 yang sampai saat ini masih dalam proses penyidikan. Kasus tersebut menyebabkan kerugian negara pada tahun bersangkutan. Dalam hal ini Kepolisian maupun pemerintah dituntut agar penyidikan kasus tersebut berjalan transparan sehingga tidak menimbulkan persepektif liar masyarakat karena kasus tersebut sudah berjalan hampir 7 tahun. Terlepas dari kasus sebelumnya Pemerintah Kota Batam telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK) RI. WTP artinya diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Beberapa penelitian terdahulu yakni Penelitian Mikael Edowai (2021) tentang Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah daerah di Kabupaten Deiyai menyimpulkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Lailaul Qodariah (2017) tentang Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang menyimpulkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi anggaran berbasis kinerja secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang., Akuntabilitas Anggaran Berbasis Kinerja secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang, Akan tetapi Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang.

PEMBAHASAN

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP No 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pemerintah merupakan indeks prestasi yang dicapai dan mencerminkan keberhasilan pemerintah serta sejauh mana pemerintah daerah menjalankan tugas-tugasnya.

Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Tolak ukur kinerja ditetapkan berdasarkan standar pelayanan yang ditentukan oleh masing-masing daerah. Menurut Mahsun (2012:148), karakteristik kinerja pemerintah daerah

yaitu :

1. Masukan (*Input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Proses (*Process*), Dalam indikator ini, organisasi/ instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Keluaran (*Output*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non-fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan.
4. Hasil (*Outcome*), menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.
5. Manfaat (*Benefit*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Dampak (*Impact*), pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

1.1.2 Definisi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2004) Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Akuntabilitas secara tidak langsung juga dapat memberikan peluang bagi pemerintah agar lebih mengoptimalkan lagi dalam proses pelaksanaan program serta seluruh kegiatan pengelolaan keuangan daerah untuk dapat dipertanggungjawabkan hasil kinerjanya kepada publik sehingga dapat mewujudkan *Good Governance*. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekedar melakukan *vertical reporting*, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan (pemerintah pusat), akan tetapi juga melakukan *horizontal reporting*, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas sebagai bentuk *horizontal accountability*.

Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas dan kegiatannya terutama yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik sebagai wujud penerapan *good governance*.

1.1.2.1 Indikator Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2004:105) indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan terdiri dari:

1. Akuntabilitas Kejujuran (*accountability for probity*) dan Akuntabilitas Hukum (*legal accountability*) berkaitan dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik yang harus dilakukan secara jujur dan benar.
2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*) berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi.
3. Akuntabilitas Program (*program accountability*) berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*) berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

5.

1.1.3 Definisi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Mardiasmo berpendapat (2004:30) Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Tranparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsi terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Pada konsep transparansi, pemerintah wajib untuk memberikan informasi baik informasi keuangan maupun informasi lainnya yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan keuangan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka yang artinya bebas diakses setiap waktu oleh masyarakat serta bisa menampung aspirasi masyarakat. Salah satu bentuk transparansi pemerintah yakni dengan diadakannya Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dikatakan bahwa Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang dapat menjadi wadah bagi masyarakat dalam menyalurkan pendapat maupun persoalan yang dihadapi sebagai wujud dari transparansi dalam pemerintahan.

1.1.3.1 Indikator Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Mardiasmo (2004:35) mengemukakan tiga karakteristik transparansi :

1. Informative (*Informative*). Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator dari informatif menurut Mardiasmo (2004:21) adalah tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan dan mudah diakses.
 2. Keterbukaan (*Openness*). Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada dibadan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.
 3. Pengungkapan (*Disclosure*). Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial seperti kondisi keuangan, susunan pengurus, bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan.
- 4.

1.2 Penelitian Terdahulu

Adapun terdapat penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Lailatul Qodariah(2017)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota	1. Akuntabilitas anggaran berbasis kinerja, Transparansi anggaran berbasis kineja, secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan

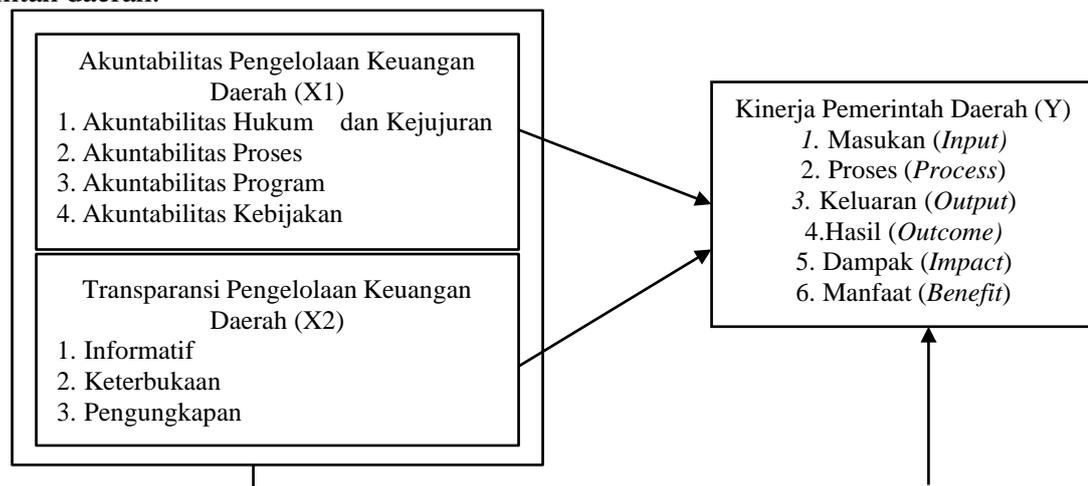
		Palembang.	<p>Kota Palembang.</p> <p>2. Akuntabilitas Anggaran Berbasis Kinerja secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang, Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang.</p>
2.	Zulkifli Umar, Cut Fittika Syawalina dan Khairunnisa (2018)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh.	<p>1. Akuntabilitas dan Transparansi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh.</p> <p>2. Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh, Transparansi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh.</p>
3.	<i>Ait Novatiani, R. Wedi Rusmawan Kusumah, Diandra Pepi Vabiani (2019)</i>	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di SKPD Kabupaten Bandung Barat	<p>1. .Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat.</p> <p>2. Akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat, Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat.</p>
4.	Mikael Edowai (2021)	Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	<p>1. Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Jember.</p> <p>2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Jember, Transparansi pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten</p>

			Jember.
5.	S Syarifudin (2023)	Pengaruh Akuntabilitas dan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas dan Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Akuntabilitas secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, Sumber Daya Manusia secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sumber: Data diolah penulis

1.3 Kerangka Berpikir

Dengan adanya sistem otonomi daerah yang meletakkan otonomi penuh, luas, dan bertanggungjawab pada daerah, pemerintah mengharapkan agar daerah dapat lebih memaksimalkan kinerjanya. Kinerja pemerintah daerah dikatakan baik apabila mampu mengelola pemerintahan dengan baik dan dapat mensejahterakan masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Serta satu variabel dependen yaitu kinerja pemerintah daerah.



Gambar 1 Kerangka Berpikir

1.4 Hipotesis Penelitian

Berikut ini adalah hipotesis dari penelitian ini:

- H₁ : Diduga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Batam.
- H₂ : Diduga transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Batam.
- H₃ : Diduga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Batam.

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode asosiatif yaitu bentuk analisis data penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Lokasi penelitian ini yaitu Kantor Kecamatan yang ada di Kota Batam.

3.2 Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Camat dan Pegawai yang ada di Kecamatan Kota Batam. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Camat, Sekretaris Camat, Kasubbag Keuangan dan Program, serta *Staff* yang memiliki pengalaman kerja selama 5 tahun atau lebih karena dipandang telah memiliki pemahaman terhadap situasi dan kondisi yang ada di Kota Batam sebanyak 30 responden. Teknik pengambilan sampel adalah *Purposive Sampling*.

3.3 Operasionalisasi Variabel

1. **Kinerja Pemerintah Daerah (Y)** : Capaian atas penyelenggaraan urusan program kebijakan pemerintahan daerah mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi yang dituangkan dalam suatu perencanaan. Indikator dari variabel ini adalah masukan (*Input*), proses (*Process*), keluaran (*Output*), hasil (*Outcome*), manfaat (*Benefit*) dan dampak (*Impact*).
2. **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)** : Suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan, menyajikan, dan melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada publik terutama mengenai pengelolaan keuangan daerah. Indikator dari variabel ini adalah akuntabilitas kejujuran hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan
3. **Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)** : Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Indikator dari variabel ini adalah informatif, keterbukaan dan pertanggungjawaban.

4.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data data primer. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner dengan mengajukan serangkaian daftar pertanyaan (terlampir) kepada para Camat, Kasubbag Keuangan dan Program serta *staff* sebanyak 30 responden. Skala yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Skala *Likert*..

3.5 Teknik Analisis Data

3.6

3.6.1 Uji Kualitas Data.

1. **Uji Validitas.** Uji validitas dilakukan untuk mengetahui suatu data yang dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Faktor-faktor yang mengurangi validitas data antara lain kepatuhan responden dalam mengikuti petunjuk pengisian kuesioner. Untuk menghitung uji validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu program statistik, dengan kriteria jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan **valid** dan jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan **tidak valid**.
2. **Uji Reliabilitas.** Menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa: "Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama". Pada penelitian ini penulis

menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* (α). suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 atau nilai korelasi hasil perhitungan lebih besar daripada nilai dalam tabel dan dapat digunakan untuk penelitian.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik.

1. **Uji Normalitas.** bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah data dapat berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal.
2. **Uji Multikolinearitas.** Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel- variabel independen antara yang satu dengan yang lainnya. Model regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinearitas (bebas dari multikolinearitas). Untuk menguji adanya adanya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflating Factor*). Jika nilai VIF < 10 dan atau nilai tolerance > 0,01 maka tidak ada multikolinearitas diantara variabel independennya dan sebaliknya.
3. **Uji Heteroskedastisitas.** bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam sebuah model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat *scatterplot*.

4.

3.6.3 Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini dilakukan untuk pengaruh beberapa variabel independen dengan variabel dependen dengan menggunakan analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*). Model yang digunakan dalam analisis regresi linear berganda yakni:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y	= Kinerja Pemerintah Daerah	α	= Konstanta
X1	= Akuntabilitas	$\beta_1 \beta_2$	= Koefisien regresi
X2	= Transparansi	e	= Kesalahan residual (<i>error term</i>)

3.6.4 Pengujian Hipotesis

1. **Uji Parsial (Uji t).** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial (individual) terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya adalah $H_0 : b_1 = 0$, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen dan apabila $H_a : b_1 \neq 0$, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusannya adalah: 1) H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ dan 2) H_a ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$.

1.1 **Uji Simultan (Uji F).** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya yakni $H_0 : b_1, b_2 = 0$, artinya secara simultan tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen dan $H_a : b_1, b_2 \neq 0$, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusannya adalah H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ dan H_a ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$.

1.2

2. **Uji Koefisien Determinasi (R²).** Pengujian koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Koefisien determinan berkisar antara nol sampai satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika R² semakin besar (mendekati

satu), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) adalah besar. Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan demikian sebaliknya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.1 Hasil Penelitian

2.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Kota Batam merupakan kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam adalah kota terbesar di provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kota Batam memiliki dua macam pemerintahan yaitu Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan. Pemerintah Kota berperan mengurus segala administrasi kependudukan dan pencatatan sipil maupun sumber daya manusia. Sedangkan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) berperan dalam tata kelola lahan dan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Batam.

2.1.2 Karakteristik Responden

1. Karakteristik responden

Dibawah ini disajikan data tentang karakteristik responden yang terdiri dari jenis kelamin, Pendidikan terakhir, dan usia.

Tabel 2 Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Total	16 14 30	53 47 100
Pendidikan Terakhir		
SMA/SMKD3 D4S1S2 Total	2 1 2 22 3 30	7 3 7 73 10 100
Usia 20-29 tahun 30-39 tahun >40 tahun Total	4 10 16 30	9 26 65 100

Sumber : Data Primer diolah

Berdasarkan Tabel 2 diatas terlihat bahwa jenis kelamin respon dan didominasi oleh laki-laki sebanyak 16 orang (53%) sedangkan sisanya responden Perempuan sebanyak 14 orang (47%). Jika dilihat dari jenjang pendidikan terakhir, responden yang lulusan SMA/SMK sebanyak 2 orang (7%), D3 sebanyak 1 orang (3%), D4 sebanyak 2 orang (7%), S1 sebanyak 22 orang (73%), dan S2 sebanyak 3 orang (10%). Mayoritas responden telah berpendidikan S1 yang artinya responden telah memahami bagaimana konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelola keuangan daerah. Selanjutnya dilihat dari usia, responden berusia 20-29 tahun sebanyak 4 orang (9%), usia 30-39 tahun sebanyak 10 orang (26%), dan usia >40 tahun sebanyak 16 orang (65%).

2.1.3 Teknik Analisis Data

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Secara Parsial

A. Akuntabilitas

Hasil uji validitas dan reabilitas secara parsial pada variabel akuntabilitas (X1) disajikan pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3 Case Processing Summary Akuntabilitas

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

Sumber: Diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, menunjukkan bahwa dari 30 jawaban responden 100% sudah valid. Kemudian hasil dari reliabilitas secara parsial terdapat pada tabel 4. berikut:

Tabel 4. Reliability Statistics Akuntabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
,830	8

Sumber: Diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 4. diketahui bahwa 11 pernyataan akuntabilitas dalam penelitian ini sudah reliabel, karena nilai *cronbach's alpha* 0,830 > 0,6. Pada tabel 4.4 menyajikan hasil uji validitas dan reliabilitas secara parsial, sebagian berikut:

Tabel 5 Item-Total Statistics Akuntabilitas

	Corrected Item-Total Correlation	Keterangan	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Keterangan
X1.1	0,541	Valid	,824	Reliable
X1.2	0,549	Valid	,823	Reliable
X1.3	0,541	Valid	,824	Reliable
X1.4	0,549	Valid	,823	Reliable
X1.5	0,803	Valid	,793	Reliable
X1.6	0,407	Valid	,833	Reliable
X1.7	0,803	Valid	,793	Reliable
X1.8	0,803	Valid	,793	Reliable
X1.9	0,407	Valid	,833	Reliable
X1.10	0,803	Valid	,793	Reliable
X1.11	0,407	Valid	,833	Reliable

Sumber: Diolah dengan SPSS

Tabel 5 menunjukkan bahwa seluruh indikator pengukuran akuntabilitas sudah valid, karena nilai *correlation* > 0.30 dan seluruh variabel penelitian sudah reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha if Item Deleted* > 0.50.

B. Transparansi

Tabel 6 Case Processing Summary Transparansi

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

Sumber: Diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 6 diatas, menunjukkan bahwa dari 30 jawaban responden 100% sudah valid. Kemudian hasil dari reliabilitas secara parsial terdapat pada tabel 7 berikut:

Tabel 7 Reliability Statistics Transparansi

Cronbach's Alpha	N of Items
,723	8

Sumber: Diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa 9 pernyataan transparansi dalam penelitian ini sudah reliabel, karena nilai *cronbach's alpha* $0,723 > 0,6$. Pada tabel 9 menyajikan hasil uji validitas dan reliabilitas secara parsial, sebagian berikut:

Tabel 9 Item-Total Statistics Transparansi

	Corrected Item-Total Correlation	Keterangan	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Keterangan
X2.1	0,556	Valid	,698	Reliable
X2.2	0,359	Valid	,737	Reliable
X2.3	0,577	Valid	,694	Reliable
X2.4	0,522	Valid	,703	Reliable
X2.5	0,650	Valid	,677	Reliable
X2.6	0,644	Valid	,681	Reliable
X2.7	0,707	Valid	,666	Reliable
X2.8	0,473	Valid	,732	Reliable
X2.9	0,585	Valid	,691	Reliable

Sumber: Diolah dengan SPSS

Tabel 9 menunjukkan bahwa seluruh indikator pengukuran transparansi sudah valid, karena nilai *correlation* $> 0,30$ dan seluruh variabel penelitian sudah reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha if Item Deleted* $> 0,50$.

C. Kinerja

Hasil uji validitas dan reliabilitas secara parsial pada variabel kinerja (Y) disajikan pada tabel 10 dibawah ini:

Tabel 10 Case Processing Summary Kinerja

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

Sumber: Diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 10 diatas, menunjukkan bahwa dari 30 jawaban responden 100% sudah valid. Kemudian hasil dari reliabilitas secara parsial terdapat pada tabel 11 berikut:

Tabel 11 Reliability Statistics Kinerja

Cronbach's Alpha	N of Items
,935	8

Sumber: Diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 11 diketahui bahwa 14 pernyataan transparansi dalam penelitian ini sudah reliabel, karena nilai *cronbach's alpha* $0,935 > 0,6$. Pada tabel 12 menyajikan hasil uji validitas dan reliabilitas secara parsial, sebagian berikut.

Tabel 12 Item-Total Statistics Kinerja

	Corrected Item-Total Correlation	Keterangan	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Keterangan
Y1.1	0,454	Valid	,942	Reliable
Y1.2	0,922	Valid	,924	Reliable
Y1.3	0,922	Valid	,924	Reliable
Y1.4	0,821	Valid	,927	Reliable
Y1.5	0,751	Valid	,930	Reliable

Y1.6	0,821	Valid	,927	Reliable
Y1.7	0,394	Valid	,943	Reliable
Y1.8	0,922	Valid	,924	Reliable
Y1.9	0,922	Valid	,924	Reliable
Y1.10	0,821	Valid	,927	Reliable
Y1.11	0,922	Valid	,924	Reliable
Y1.12	0,751	Valid	,930	Reliable
Y1.13	0,751	Valid	,930	Reliable
Y1.14	0,394	Valid	,943	Reliable

Sumber: Diolah dengan SPSS

Tabel 12 menunjukkan bahwa seluruh indikator pengukuran kinerja sudah valid, karena nilai *correlation* > 0.30 dan seluruh variabel penelitian sudah reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha if Item Deleted* > 0,50.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Secara Simultan

Tabel 13 Case Processing Summary Secara Simultan

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

Sumber: Diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 13 diatas, menunjukkan bahwa dari 30 jawaban responden 100% sudah valid. Kemudian hasil dari reliabilitas secara simultan diperoleh sebagai berikut:

Tabel 14 Reliability Statistics Secara Simultan

Cronbach's Alpha	N of Items
,861	24

Sumber: Diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 14 diketahui bahwa 34 pernyataan penelitian ini sudah reliable, karena nilai *cronbach's alpha* 0,861 > 0,6. Pada tabel 15 menyajikan hasil uji validitas dan reabilitas secara simultan, sebagai berikut:

Tabel 15 Item-Total Statistics Secara Simultan

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1_1	122.87	81.913	.348	.858
X1_2	122.93	83.444	.215	.861
X1_3	122.87	81.913	.348	.858
X1_4	122.93	83.444	.215	.861
X1_5	123.37	81.964	.335	.858
X1_6	123.50	85.224	.092	.863
X1_7	123.37	81.964	.335	.858
X1_8	123.37	81.964	.335	.858
X1_9	123.50	85.224	.092	.863
X1_10	123.37	81.964	.335	.858
X1_11	123.50	85.224	.092	.863
X2_1	122.93	83.651	.149	.864
X2_2	122.93	86.409	-.036	.870
X2_3	122.93	84.340	.102	.866
X2_4	123.70	81.252	.354	.858
X2_5	123.00	79.793	.449	.855

X2_6	123.43	80.530	.321	.860
X2_7	122.93	77.513	.671	.849
X2_8	123.50	78.397	.398	.858
X2_9	122.97	78.930	.498	.854
Y_1	123.07	82.271	.352	.858
Y_2	123.27	80.892	.645	.853
Y_3	123.27	80.892	.645	.853
Y_4	123.30	81.114	.599	.854
Y_5	123.43	81.357	.535	.855
Y_6	123.30	81.114	.599	.854
Y_7	123.20	81.752	.432	.856
Y_8	123.27	80.892	.645	.853
Y_9	123.27	80.892	.645	.853
Y_10	123.30	81.114	.599	.854
Y_11	123.27	80.892	.645	.853
Y_12	123.43	81.357	.535	.855
Y_13	123.43	81.357	.535	.855
Y_14	123.20	81.752	.432	.856

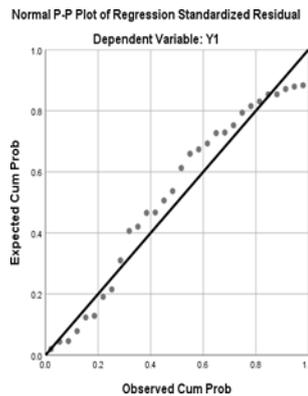
Sumber: Data diolah dengan SPSS

Tabel 15 menunjukkan bahwa 24 pernyataan sudah valid, karena nilai $r_{hitung} > 0,30$ dan seluruh variabel penelitian sudah reliabel, karena nilai *cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,50.

4.1.3.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan *normal probability plot* dan *Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan model *Asymp sig*. Jika nilai *Asymp sig* > nilai α yaitu 0,05 (5%) maka data berdistribusi normal.



Gambar 2 Gambar Normal Probability Plot

Tabel 16 Tabel Kolmogrov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.62852193
Most Extreme Differences	Absolute	.131
	Positive	.108

	Negative	-.131
Test Statistic		.131
Asymp. Sig. (2-tailed)		.198 ^c

Sumber: Diolah dengan SPSS

Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa data yang akan diteliti berada di sekitar garis diagonal dan pada tabel 14 dapat dilihat bahwa besarnya signifikan lebih dari 5% (0,05) yaitu signifikannya sebesar 0,198 (19,8%) yang berarti variabel residual berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance value*. Jika nilai VIF < 10 dan *tolerance value* > 0,01, variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 17 Hasil Uji Multikolinearitas

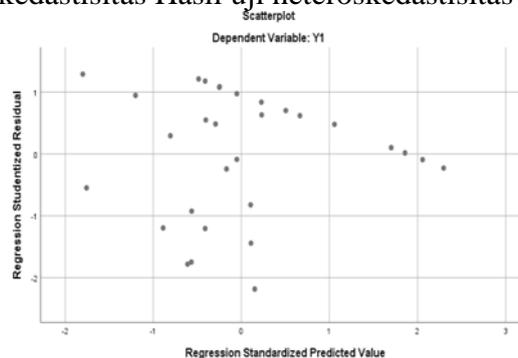
		Coefficients ^a			
		Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Tolerance	VIF
1	(Constant)	28.340	2.237		
	X1	.093	.041	.999	1.001
	X2	.564	.043	.999	1.001

Sumber: Diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 16 dapat dilihat bahwa *tolerance value* > 0,01 dan VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa di antara variabel bebas tersebut tidak terdapat hubungan multikolinearitas, atau dengan kata lain tidak ada korelasi di antara masing- masing variabel independen. Sehingga semua variabel ini bebas dari masalah multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya salah satu penyimpangan asumsi klasik, yaitu varian dari residual tidak konstan. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas Hasil uji heteroskedastisitas disajikan sebagai berikut



Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil pengujian menggunakan metode *scatterplots* pada gambar 4.2 di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai.

4.1.3.3 Persamaan Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan regresi linear berganda yang ditujukan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah kota Batam. Hasil analisis regresi linier berganda ditunjukkan pada tabel 4.16.

Tabel 4.16 Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28.340	2.237		12.671	.000
	X1	.093	.041	.157	2.243	.033
	X2	.564	.043	.914	13.027	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Diolah dengan SPSS

Berdasarkan hasil uji estimasi regresi diatas, maka model regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 28,340 + 0,093X1 + 0,564X2 + e$$

Persamaan regresi linear berganda dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai 28,340 Adalah nilai konstanta yang artinya apabila X (akuntabilitas dan transparansi) konstan atau tidak ada perubahan maka besarnya nilai variabel Y (kinerja) sebesar 28,340.
2. Nilai koefisien regresi (b1) 0,093 pada variabel akuntabilitas (X1) artinya jika X1 meningkat 1 satuan maka kinerja pemerintah akan naik sebesar 0,093.
3. Nilai koefisien regresi (b2) 0,564 pada variabel transparansi (X2) artinya jika X2 meningkat 1 satuan maka kinerja pemerintah akan naik sebesar 0,564.

4.1.3.4 Uji Hipotesis

1. Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah kota Batam yang dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut.

Tabel 4.17 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28.340	2.237		12.671	.000
	X1	.093	.041	.157	2.243	.033
	X2	.564	.043	.914	13.027	.000

Sumber: Diolah dengan SPSS

Tabel 17 menunjukkan secara parsial pengaruh variabel bebas yaitu akuntabilitas dan transparansi terhadap variabel terikat yaitu kinerja. Keputusan ditolak atau diterima nilai thitung > ttabel dengan ketentuan nilai signifikan harus < 0,05.

- a. Variabel akuntabilitas memiliki nilai thitung yaitu 2.243 lebih besar dari ttabel yaitu 1.703 dan nilai signifikansi sebesar 0,033 dimana 0,033 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah kota Batam, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis (Ha₁) **diterima**.
- b. Variabel transparansi memiliki nilai thitung yaitu 13.027 lebih besar dari ttabel yaitu 1.703 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana 0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

pemerintah kota Batam, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H_{a1}) **diterima**.

2. Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh akuntabilitas dan transparansi secara simultan. Hasil uji statistik F dilihat dengan nilai signifikansi $< 0,05$. Berikut merupakan hasil uji statistik F:

Tabel 18 Uji Statistik Secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	162.193	2	81.097	88.110	.000 ^b
	Residual	24.851	27	.920		
	Total	187.044	29			

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan hasil uji statistik F di atas diperoleh F hitung sebesar 88,110 $> 3,35$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 $< 0,05$. Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Kota Batam.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil koefisien determinasi (R^2) pada model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.931 ^a	.867	.857	.95938	2.463

Sumber: Diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 19 di atas diperoleh nilai R Square yaitu 0,867 yang artinya bahwa variasi akuntabilitas dan transparansi mampu menjelaskan variabel kinerja sebesar 86,7% sedangkan sisanya (13,3%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti atau diluar model dalam penelitian ini.

2.2 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Batam.

2.2.1 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Batam

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diperoleh jawaban yang paling dominan pada variabel akuntabilitas ialah indikator Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran dengan persentase responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang (26%), setuju 17 orang (57%), ragu-ragu 5 orang (17%), tidak setuju 0 orang (0%), dan sangat tidak setuju (0%). Responden yang menyatakan sangat setuju bahwa penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku sebanyak 7 orang (23%), setuju 17 orang (57%), ragu-ragu 6 orang (20%), tidak setuju 0 orang (0%), dan sangat tidak setuju 0 orang (0%). Responden yang menyatakan sangat setuju bahwa anggaran yang di rancang sesuai dengan aturan yang dilandaskan hukum guna memberikan hasil kinerja yang baik sebanyak 8 orang (26%), setuju 17 orang (57%), ragu-ragu 5 orang (17%), tidak setuju 0 orang (0%), dan sangat tidak setuju 0 orang (0%). Dimana dipersepsikan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah selalu ada jaminan kepatuhan hukum dan peraturan lainnya, penyusunan dan penggunaan anggaran

telah menggunakan akuntabilitas kejujuran serta

didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku sehingga dapat mencapai kinerja yang baik, selain itu diberlakukan sanksi kepada setiap pegawai yang menyalahgunakan jabatan, dan KKN. Hal seperti ini harus tetap dipertahankan dengan selalu memperhatikan hukum dan peraturan dalam mengelola keuangan daerah.

Berdasarkan hasil pengolahan statistik Uji t statistic diperoleh nilai Uji thitung untuk variabel akuntabilitas sebesar $2.243 > 1.703$ selain itu memiliki nilai sign. $0,000 < 0,05$ diterima sehingga dapat dikatakan bahwa akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah di Kota Batam. Dari hasil tersebut bias disimpulkan H₁ diterima. Penelitian ini sesuai dengan Mikael Edowai, (2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.2.2 Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Batam

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diperoleh jawaban yang paling dominan pada variabel transparansi ialah indikator Pengungkapan dengan persentase responden yang menyatakan sangat setuju bahwa transparansi anggaran dapat mengakomodasi suara rakyat sebanyak 8 orang (27%), setuju 15 orang (50%), ragu-ragu 7 orang (23%), tidak setuju 0 orang (0%), dan sangat tidak setuju (0%). Persentase responden yang menyatakan sangat setuju bahwa pengumuman tentang anggaran bisa didapat setiap waktu sebanyak 5 orang (17%), setuju 9 orang (30%), ragu-ragu 12 orang (40%), tidak setuju 3 orang (10%), dan sangat tidak setuju 1 orang (3%). Persentase responden yang menyatakan sangat setuju bahwa pengumuman kebijakan anggaran mudah didapatkan oleh publik sebanyak 9 orang (30%), setuju 12 orang (40%), ragu-ragu 9 orang (30%), tidak setuju 0 orang (0%), dan sangat tidak setuju 0 orang (0%). Dimana dipersepsikan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah sudah transparan artinya laporan keuangan telah disajikan selama periode tertentu dan dapat mengakomodasi usulan atau suara rakyat serta pengumuman mengenai kebijakan anggaran dapat diakses oleh publik dan didapat setiap waktu.

Berdasarkan hasil pengolahan statistik Uji t statistik diperoleh nilai Uji thitung untuk variabel transparansi sebesar $13,027 > 1,703$, selain itu memiliki nilai sign. $0,033 < 0,05$ **diterima** sehingga dapat dikatakan bahwa transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah di Kota Batam. Dari hasil tersebut bias disimpulkan H₂ diterima. Penelitian ini sesuai dengan Mikael Edowai, (2021) pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.2.3 Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Batam

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diperoleh jawaban yang paling dominan pada variabel kinerja ialah indikator hasil dengan persentase setuju. Responden yang menyatakan sangat setuju bahwa anggaran dikelola secara efektif, dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan sebanyak 0 orang (0%), setuju 20 orang (67%), ragu-ragu 10 orang (33%), tidak tidak setuju 0 orang (0%), dan sangat tidak setuju 0 orang (0%). Responden yang menyatakan sangat setuju bahwa anggaran dikelola secara efisien dengan penggunaan terendah untuk mencapai tujuan tertentu sebanyak 2 orang (7%), setuju 19 orang (63%), ragu-ragu 9 orang (30%), tidak tidak setuju 0 orang (0%), dan sangat tidak setuju 0 orang (0%). Responden yang menyatakan sangat setuju bahwa anggaran dikelola secara adil dan merata dimana ada kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas sebanyak 0 orang (0%), setuju 21 orang (70%), ragu-ragu

9 orang (30%), tidak setuju 0 orang (0%), dan sangat tidak setuju 0 orang (0%). Responden yang menyatakan sangat setuju bahwa pelaksanaan kegiatan terkadang menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebanyak 0 orang (0%), setuju 21 orang (70%), ragu-ragu 9 orang (30%), tidak setuju 0 orang (0%), dan sangat tidak setuju 0 orang (0%). Dimana dipersepsikan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah sudah efektif, efisien dan dikelola secara adil dan merata dimana ada kesempatan sosial yang sama dalam mendapatkan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengolahan statistik Uji F statistic diperoleh nilai F hitung sebesar $88,110 > 3,35$, dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dapat disimpulkan secara simultan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Batam. Dari hasil tersebut bisa disimpulkan H_3 diterima. Penelitian ini sesuai dengan Mikael Edowai, (2021) pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan:

1. Akuntabilitas pengelola keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Batam.
2. Transparansi pengelolaan keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Batam.
3. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Batam. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan maka kinerja pemerintah daerah Kota Batam juga semakin meningkat.

Saran penelitian ini ditujukan kepada Pemerintah Kota Batam agar mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sehingga kinerja pemerintah daerah Kota Batam semakin berkualitas. Dalam hal ini yakni informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh publik setiap waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Edowai, M. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Deiyai. *Tesis*. Pascasarjana Universitas Bosowa, Makassar.
- Hendra Karianga. (2013). *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kencana.
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit BPFE
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Ombudsman RI, (2023, Mei, 04), <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia--ombudsman-minta-polisi-transparan-soal-kasus-perjalanan-dinas-dprd-batam>. Diakses pada 20 Mei 2023.
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 *tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*
- Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2014 *tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Profil Kota Batam: Pemerintah Kota Batam. <https://jdih.batam.go.id/>. Diakses pada 12
- Qodariah, Lailatul. (2017). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah

- Palembang.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- TAP MPR No. IX/MPR/1998 *tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.